



Evaluasi Transparansi Informasi Publik dalam Implementasi Program Makan Siang Gratis

Evaluation of Public Transparency in the Implementation of the Free Lunch Program

Merlyana Elgy Vidiyani¹, Safila Ummu Wahdanicha², Meirinawati³,
Indra Devian Lumban Gaol⁴

Universitas Negeri Surabaya

Email: 25112064005@mhs.unesa.ac.id¹, 25112064016@mhs.unesa.ac.id², meirinawati@unesa.ac.id³,

Indragaol@unesa.ac.id⁴

Article Info

Article history:

Received : 17-04-2026

Revised : 19-04-2026

Accepted : 21-04-2026

Published : 23-04-2026

Abstract

This research project seeks to assess how public information is shared and carried out regarding the Free Lunch Program in Indonesia. Transparency is fundamental to effective governance as it fosters responsibility, effectiveness, and public confidence. The study employs a qualitative method combined with a literature review approach. Results show that while the program delivers notable advantages for nutrition and well-being, there remain obstacles regarding information transparency, including restricted access to data, insufficient accountability mechanisms, and minimal public engagement. It is essential to improve transparency by utilizing digital technologies, encouraging community participation, and promoting transparent reporting to boost the effectiveness of the program.

Keywords : Transparency, Public Information, Free Lunch Program

Abstrak

Proyek penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana informasi publik dibagikan dan dilaksanakan terkait Program Makan Siang Gratis di Indonesia. Transparansi sangat penting untuk tata kelola yang efektif karena mendorong tanggung jawab, efektivitas, dan kepercayaan publik. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan tinjauan pustaka. Hasil menunjukkan bahwa meskipun program ini memberikan keuntungan yang signifikan bagi gizi dan kesejahteraan, masih terdapat kendala terkait transparansi informasi, termasuk akses data yang terbatas, mekanisme akuntabilitas yang tidak memadai, dan keterlibatan publik yang minimal. Penting untuk meningkatkan transparansi dengan memanfaatkan teknologi digital, mendorong partisipasi masyarakat, dan mempromosikan pelaporan yang transparan untuk meningkatkan efektivitas program.

Kata Kunci : Transparansi, Informasi Publik, Program Makan Siang Gratis

PENDAHULUAN

Transparansi data untuk masyarakat adalah salah satu fondasi penting dalam pelaksanaan pemerintahan modern yang menekankan pada transparansi dan tanggung jawab. Dalam kerangka tata kelola yang baik, akses informasi memiliki peran yang signifikan dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Lebih dari itu, akses informasi juga merupakan hak fundamental masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang nasional, seperti Undang-Undang Transparansi Informasi Publik.

Di arena kebijakan publik, transparansi dianggap sebagai salah satu parameter yang krusial untuk mengevaluasi keberhasilan suatu inisiatif pemerintah. Program yang bersifat transparan lebih



mudah untuk diawasi oleh masyarakat sehingga risiko penyimpangan dapat dikurangi. Sebaliknya, kekurangan dalam keterbukaan informasi dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat serta menimbulkan konflik sosial (Hakim & Phahlevy, 2024).

Program Makan Siang Gratis adalah salah satu langkah pemerintah yang dirancang untuk memperbaiki mutu gizi masyarakat, khususnya anak-anak di sekolah, sekaligus menekan angka stunting dan kemiskinan. Inisiatif ini mendapatkan perhatian dari publik karena melibatkan anggaran yang signifikan dan langsung menyasar pada kelompok rentan. Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul berbagai masalah seperti ketidakakuratan sasaran penerima, distribusi yang tidak merata, dan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran (Yudistira et al., 2026). Ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan dan transparansi informasi terkait program tersebut.

Berdasarkan permasalahan ini, penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai transparansi informasi publik dalam distribusi dan pelaksanaan Program Makan Siang Gratis, serta mencari tahu kendala solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki transparansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur. Pemilihan pendekatan ini dilakukan agar penelitian dapat mengeksplorasi berbagai sumber tulisan yang relevan dengan isu yang sudah diteliti. Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari artikel ilmiah, buku, laporan kebijakan, dan juga publikasi dari organisasi internasional. Penggunaan data sekunder dianggap efisien untuk meneliti fenomena kebijakan publik secara menyeluruh.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dengan cara mengenali, menelaah, dan menganalisis beragam sumber terkait dengan transparansi informasi publik serta pelaksanaan kebijakan. Analisis data dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang melibatkan penjabaran data yang dikumpulkan dan menghubungkannya dengan teori serta konsep yang bersangkutan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi transparansi informasi dalam program yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Transparansi Informasi Publik

Transparansi informasi publik merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari lembaga publik dengan cara yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari prinsip ini adalah membangun pemerintahan yang transparan dan peka terhadap kebutuhan warganya. Berdasarkan (Afriaji, 2026), transparansi adalah salah satu dasar utama dalam tata kelola yang baik yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas dari kebijakan yang ada. Lebih dari itu, transparansi juga berperan sebagai instrumen pengawasan masyarakat yang memungkinkan warga untuk memantau aktivitas pemerintahan. (Info, 2025) menekankan bahwa transparansi informasi mampu mengurangi tindakan koruptif dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dengan adanya akses yang lebih luas terhadap informasi, maka masyarakat bisa berperan aktif dalam mengawasi kebijakan publik. Namun, dalam pelaksanaannya, transparansi informasi sering kali mengalami berbagai hambatan seperti sistem birokrasi yang rumit, keterbatasan dalam teknologi, serta rendahnya kepedulian pemerintah dalam menyediakan informasi (Afriaji, 2026).



Implementasi Program Makan Siang Gratis

Implementasi Makan Siang Gratis dirancang untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak sekaligus mendukung pendidikan. Program ini juga berkontribusi secara sosial yang signifikan, khususnya dalam meringankan tekanan ekonomi pada keluarga. Studi menunjukkan bahwa program makan gratis di institusi pendidikan dapat meningkatkan tingkat kehadiran siswa serta konsentrasi dalam belajar. Ini menunjukkan bahwa inisiatif ini memberikan keuntungan yang luas, tidak hanya dalam segi kesehatan tetapi juga dalam aspek pendidikan (Andreas et al., 2025).

Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi beragam kendala. Salah satu isu utama adalah distribusi yang tidak merata, sehingga tidak semua kelompok yang dijadikan sasaran dapat menikmati keuntungan secara maksimal. Di samping itu, pengelolaan anggaran yang kurang jelas juga menjadi perhatian masyarakat. Minimnya informasi mengenai penggunaan dana dapat menimbulkan kecurigaan dan mengurangi rasa percaya publik terhadap program tersebut.

Dampak Program Makan Siang Gratis terhadap Masyarakat

Program Makan Siang Gratis memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Menurut kajian sebelumnya, program makan gratis di sekolah dapat meningkatkan asupan gizi siswa dan mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Di samping itu, penelitian oleh (). Mengindikasikan bahwa program ini dapat meningkatkan jumlah siswa yang hadir di sekolah karena intensif berupa makanan gratis. Hal ini secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Ada beberapa anak mengalami keracunan karena mengonsumsi makanan tersebut karena makanan tersebut dimasak di waktu dini hari dalam jumlah yang sangat banyak dan makanan itu dikonsumsi pada waktu siang hari, ini juga secara tidak langsung berpengaruh pada kesehatan anak (Zahira et al., 2026).

Namun, manfaat tersebut masih belum dirasakan secara merata oleh semua kalangan. Ini menyebabkan adanya kesalahan dalam penyaluran serta terbatasnya informasi yang diterima masyarakat (Akuntansi, 2026). Oleh karena itu, transparansi informasi menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa keuntungan dari progra ini dapat dinikmati secara adil.

Permasalahan Transparansi Informasi dalam Program

Hasil kajian mengungkapkan beberapa isu utama terkait dengan transparansi informasi:

1. Transparansi Akses Informasi

Masyarakat masih kekurangan informasi yang cukup mengenai prosedur dan mekanisme program. Ini mengakibatkan pemahaman masyarakat yang rendah terhadap program tersebut.

2. Kurangnya Transparansi Anggaran

Informasi mengenai penggunaan anggaran belum diungkapkan secara transparan. Padahal, transparansi anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam akuntabilitas kebijakan publik (Wibowo et al., 2026).

3. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan program. Hal ini menyebabkan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan menjadi lemah.



4. Sistem Informasi yang Belum Optimal

Penggunaan teknologi untuk penyebaran informasi masih terbatas, sehingga akses informasi menjadi tidak merata.

Tabel 2. Evaluasi Keterbukaan informasi Program

Aspek	Kondisi Saat Ini	Permasalahan	Dampak
Transparansi Akses Informasi	Terbuka	Informasi tidak seimbang	Masyarakat kurang paham mengenai program
Transparansi Anggaran Tidak Transparan	Tidak transparan	Data tidak mendetail	Mengurangi kepercayaan publik
Partisipasi Masyarakat	Rendah	Tidak terlibat	Pengawasan kurang efektif
Sistem Digital	Belum maksimal	Jumlah platform sedikit	Sulit untuk diakses

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa walaupun akses informasi secara resmi sudah ada, kualitas informasi yang diberikan masih belum merata dan tidak sepenuhnya sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Ketidakseimbangan dan kurangnya kedalaman informasi mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat dalam memahami mekanisme dan tujuan program secara keseluruhan. Situasi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya terkait dengan tersedianya informasi, melainkan juga dengan kualitas serta kemudahan akses informasi tersebut (Wibowo et al., 2026).

Di sisi lain, aspek transparansi anggaran menunjukkan kondisi yang lebih memprihatkan, karena rincian tentang penggunaan dana publik masih disampaikan dengan kurang detil dan terbuka. Kurangnya detail dalam data membuat masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan anggaran. Situasi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengingat transparansi anggaran menjadi salah satu indikator utama dalam akuntabilitas kebijakan publik (Agustini & Mulyani, 2025).

Selanjutnya, rendahnya keterlibatan masyarakat juga menjadi isu penting dalam pelaksanaan program ini. Masyarakat belum, berpartisipasi secara aktif dalam proses pengawasan maupun evaluasi kebijakan, yang menyebabkan kontrol sosial terhadap pelaksanaan program menjadi lemah. Dalam pandangan tata kelola yang melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat, risiko terjadinya penyimpangan dan ketidakuratan sasaran akan semakin meningkat (Aini & Indarti, 2025).

Di sisi lain, sistem digital yang ada untuk mendukung transparansi informasi masih belum optimal. Keterbatasan jumlah platform dan kurangnya sistem terintegrasi menyebabkan akses informasi menjadi sulit bagi masyarakat secara umum. Namun, di era digital saat ini peran teknologi informasi sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi penyampaian informasi publik. Ketidakefektifan sistem digital menunjukkan kebutuhan akan inovasi dalam manajemen informasi, seperti pengembangan portal transparansi yang terintegrasi dan ramah pengguna untuk masyarakat (Adysti & Rosalia, 2025).



Strategi Peningkatan Transparansi Informasi

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan transparansi. Penerapan langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dan memperkuat akuntabilitas pemerintah (Suyuthi et al., 2025).

Tabel 3. Rekomendasi Kebijakan

Masalah	Solusi	Tujuan
Kurangnya transparansi	Penerbitan laporan yang terbuka	Meningkatkan kepercayaan masyarakat
Partisipasi yang rendah	Keterlibatan masyarakat	Pengawasan yang lebih baik
Kelemahan sistem informasi	Digitalisasi data	Akses yang luas
Distribusi yang tidak merata	Perbaikan data penerima	Agar lebih tepat sasaran

Pembahasan

Secara keseluruhan, transparansi informasi dalam Program Makan Siang Gratis di Sekolah masih memiliki banyak kendala baik dari segi struktural maupun teknis. Dari aspek struktural, belum adanya sistem informasi yang terhubung dengan baik membuat data tentang penerima manfaat, alokasi dana, dan mekanisme distribusi tidak tersedia secara transparan dan sulit di akses oleh publik. Di sisi teknis, kurangnya kapasitas SDM dan penggunaan teknologi informasi juga menghalangi kemampuan transparan. Situasi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi informasi publik belum optimal, meskipun program ini bertujuan positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama terkait untuk pemenuhan gizi dan peningkatan pendidikan (Sandika & Waseu, 2026).

Dalam sudut pandang teori good governance, transparansi merupakan pilar utama yang berkaitan erat dengan akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Sejalan dengan itu, transparansi juga merupakan syarat penting untuk mencapai akuntabilitas publik, dimana pemerintah diharuskan untuk menyediakan informasi yang akurat dan terbuka sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik(). Selain itu, transparansi informasi berfungsi untuk mengurangi ketimpangan informasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga membantu menciptakan kebijakan yang lebih baik dan mengurangi kemungkinan terjadinya ketimpangan (Negara, 2025).

Selanjutnya, transparansi memiliki aspek penting. Dalam Program Makan Siang Gratis, aspek ini sangat penting karena melibatkan hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi pelaksanaan program. Namun, kenyataannya keterbukaan informasi yang ada saat ini masih terbatas, yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah seperti ketidakakuratan sasaran, lemahnya pengawasan publik, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Walaupun demikian, transparansi tidak selalu memberikan dampak positif jika tidak dikelola dengan baik. Dalam beberapa situasi, transparansi yang berlebihan justru dapat menyebabkan inefisiensi dalam administrasi karena meningkatkan beban laporan dalam birokrasi(). Selain itu transparansi bisa efektif jika informasi yang disediakan relevan, mudah dipahami, dan dapat digunakan oleh masyarakat. Jika informasi terlalu rumit, ini dapat menyebabkan kesalahpahaman yang berakibat pada kepercayaan publik.



Di sisi lain, transparansi juga bisa menimbulkan risiko politisasi kebijakan serta tantangan dalam melindungi data pribadi. Dalam program yang ditujukan untuk kelompok yang rentan, keterbukaan informasi perlu mempertimbangkan aspek etika dan keamanan data. Tanpa pengelolaan yang hati-hati transparansi dapat mengancam privasi para penerima manfaat (Kasus et al., 2025).

Berdasarkan penjelasan di atas, transparansi bukanlah solusi tunggal untuk menyelesaikan masalah kebijakan publik. Transparansi yang efektif harus bersifat proporsional, sesuai konteks, dan dikelola dengan baik. Dengan demikian, diperlukan komitmen dari pemerintah untuk meningkatkan transparansi informasi melalui cara yang lebih strategis. Digitalisasi sistem informasi publik yang terintegritas dapat membantu meningkatkan akses data secara real-time. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga perlu diperkuat, dengan tetap menjaga efisiensi administrasi dan perlindungan data pribadi (Adysti & Rosalia, 2025). Dengan cara ini, akses terhadap informasi harus dianggap sebagai alat strategis yang membutuhkan pengelolaan yang baik. Apabila transparansi diterapkan dengan seimbang, maka program akan berjalan lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, serta akan mampu membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan keberlangsungan kebijakan dalam jangka panjang (Sandika & Waseu, 2026).

KESIMPULAN

Kepemimpinan transformasional terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur desa di Desa Teungoh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, begitu pula disiplin kerja yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas perangkat desa. Penerapan gaya kepemimpinan transformasional oleh Kepala Desa, melalui inspirasi dan motivasi personal, mendorong inovasi pelayanan publik dan peningkatan produktivitas aparatur, sementara tekad profesional kepala desa, termasuk disiplin waktu dan penguatan tata kelola administrasi, berdampak langsung pada kualitas layanan masyarakat. Dukungan sistematis dari pimpinan, pelimpahan wewenang yang terstruktur, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menunjang kinerja aparatur desa. Oleh karena itu, sinergi antara visi transformatif kepala desa dan budaya kerja profesional, didukung kolaborasi erat antara Kepala Desa dan seluruh perangkat desa, menjadi fondasi utama untuk merespons kebutuhan masyarakat secara efektif dan responsif, sehingga Desa Teungoh dapat dijadikan model tata kelola pemerintahan desa yang unggul di wilayah Kota Lhokseumawe

DAFTAR PUSTAKA

- Adysti, J., & Rosalia, F. (2025). *Penerapan Prinsip Good Governance dalam Perencanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Lampung Utara Kotabumi Selatan*. 4(4), 2913–2920.
- Afriaji, M. (2026). *Komunikasi Kebijakan dalam Meningkatkan Kepercayaan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Publik*. 5(1), 302–311.
- Agustini, U., & Mulyani, S. (2025). *EFEKTIVITAS DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI INTERVENSI PENDIDIKAN DI INDONESIA EFFECTIVENESS AND CHALLENGES OF FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM POLICY AS AN EDUCATIONAL*. 4, 362–368.
- Aini, K. N., & Indarti, N. (2025). *Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Peningkatan Kesadaran Pajak Masyarakat di Grati Instrumen*. 6(3), 581–592.



<https://doi.org/10.15294/baej.v6i3.35599>

- Akuntansi, J. E. (2026). *Jurnal Ekonomi Akuntansi*. 4.
- Andreas, K., Tambunan, H., Nababan, R., Siagian, R. A., Naiborhu, R., Harianti, S., & Jamaludin, J. (2025). *Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa*. 2.
- Hakim, A. L., & Phahlevy, R. R. (2024). *Transparansi Berjaya Seiring Meluasnya Akses Informasi di Indonesia*. 3, 1–14.
- Info, A. (2025). *GOVERNANCE ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE*. 16680.
- Kasus, S., Sdn, P., & Kabupaten, K. (2025). *Implementasi kebijakan makan bergizi gratis (mbg) (studi kasus pada sdn 3 kepanjen kabupaten malang)*. 7(1), 67–79.
- Negara, A. (2025). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 12(2), 196–206.
- Sandika, T. A., & Waseu, I. (2026). *Implementasi Fungsi Pengawasan oleh Relawan dalam Meningkatkan Kinerja Manajemen MBG di SPPG Yayasan Rizviar*. 3, 154–159.
- Suyuthi, M. A., Leonita, S., Haifan, M., & Adiarifia, N. (2025). *DISTRIBUSI PANGAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM MAKAN*. 461–465.
- Wibowo, B. T., Ardeka, F., Rianestu, S., & Lumban, I. D. (2026). *Transparansi dan Pengawasan Keuangan Negara dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)*. 11(April), 64–70.
- Yudistira, I. M. C., Hartono, M. S., & Lasmawan, I. W. (2026). *Analisis Normatif Transparansi Hukum Atas Keterbatasan Akses Informasi Publik Kasus Perusakan Lingkungan*. 5(1), 2369–2376.
- Zahira, K. L., Aprilla, A., Sugiono, L. P., & Ambar, Y. (2026). *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*. 11(1).